

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI ATAS TANAH
REDISTRIBUSI YANG DIALIHKAN SECARA MELAWAN HUKUM
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 170/PDT/2019/PT.DPS)**

Oleh

I Made Ariyuda, 2114101078

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kompleksitas permasalahan pengalihan tanah redistribusi yang melawan hukum dan upaya perlindungan bagi pembeli yang dirugikan. Fokus utamanya adalah memahami sejauh mana kerangka hukum positif Indonesia melindungi pihak ketiga, khususnya pembeli, dalam jual beli tanah yang dinyatakan tidak sah. Selain itu, penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 170/PDT/2019/PT.Dps terkait pengalihan tanah redistribusi. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, seperti literatur-literatur hukum, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan terkait serta putusan pengadilan yang kemudian di kumpulkan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengalihan hak dalam kasus yang diteliti dilakukan tanpa persetujuan berwenang, menjadikannya perbuatan melawan hukum. Hakim menyatakan jual beli tersebut tidak sah dan mengembalikan hak atas tanah kepada ahli waris yang sah. Penelitian ini juga mengungkap adanya kekosongan norma terkait dengan bentuk perlindungan hukum bagi pembeli tanah redistribusi yang tidak sah. Ketidadaan regulasi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan ketimpangan tanggung jawab hukum yang menempatkan pembeli pada posisi rentan. Pembeli sering menanggung kerugian finansial tanpa mekanisme pemulihan memadai. Melalui pendekatan hukum normatif, studi ini menegaskan perlunya pembaruan regulasi. Rekomendasi mencakup penguatan perlindungan hukum preventif, seperti peningkatan transparansi data pertanahan, edukasi publik, peran aktif PPAT dalam verifikasi, dan penandaan khusus pada sertifikat redistribusi. Selain itu, perlindungan represif melalui gugatan perdata untuk ganti rugi dan sanksi pidana bagi pelaku manipulasi juga diperlukan. Pembaruan ini esensial untuk menciptakan kepastian hukum dan menjamin keadilan bagi semua pihak dalam transaksi tanah redistribusi di Indonesia.

Kata kunci: tanah redistribusi, perlindungan hukum, putusan pengadilan.

**LEGAL PROTECTION FOR BUYERS OF UNLAWFULLY TRANSFERRED
REDISTRIBUTED LAND
(ANALYSIS OF COURT DECISION NUMBER 170/PDT/2019/PT.DPS)**

By

I Made Ariyuda, 2114101078

Department of Law and Citizenship

ABSTRACT

This research analyzes the complexity of the problem of unlawful redistribution land transfers and the protection efforts for aggrieved buyers. The main focus is to understand the extent to which the Indonesian positive legal framework protects third parties, especially buyers, in land sales and purchases that are declared invalid. In addition, this study analyzes the legal considerations in Denpasar High Court Decision Number 170/PDT/2019/PT.Dps related to the transfer of redistributed land. This research uses normative legal research methods with statutory, case, and conceptual approaches. Data was collected through literature studies, such as legal literature, journal articles, relevant laws and regulations and court decisions which were then collected and analyzed descriptively qualitatively. The results of this study found that the transfer of rights in the case under study was carried out without authorized consent, making it an unlawful act. The judge declared the sale and purchase invalid and returned the land rights to the legal heirs. This research also reveals a normative vacuum related to the form of legal protection for unauthorized buyers of redistributed land. This absence of regulation creates legal uncertainty and imbalance of legal responsibility that puts buyers in a vulnerable position. Buyers often bear financial losses without adequate recovery mechanisms. Through a normative legal approach, this study emphasizes the need for regulatory reform. Recommendations include strengthening preventive legal protections, such as increased transparency of land data, public education, active role of PPAT in verification, and special markings on redistribution certificates. In addition, repressive protection through civil suits for compensation and criminal sanctions for perpetrators of manipulation are also needed. This reform is essential to create legal certainty and ensure justice for all parties in land redistribution transactions in Indonesia.

Keywords: redistributed land, legal protection, court decision.